



# Periksa LKPD, Bupati Terima Tim BPK

**SINTANG**-Bupati Sintang, Jarot Winarno menerima Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD Tahun Anggaran 2021 di Pendopo Bupati Sintang pada Senin, (14/3) lalu.

Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Faujar Sukma Wibawa tersebut membawa 6 orang auditor untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 merupakan lanjutan dari pemeriksaan interim yang sudah dilakukan sebelumnya.

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan pemeriksaan terinci oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat akan dilakukan sampai 9 April 2022 dan itu sudah



FOTO ISTIMEWA

**TERIMA BPK:** Bupati Sintang, Jarot Winarno menerima tim BPK RI Kalbar yang akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD 2021 Kabupaten Sintang.

memasuki bulan puasa ramadhan. Sehingga jadwal pemeriksaan harus diatur supaya waktunya cukup. Dirinya minta OPD membantu tim pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK RI Kalbar.

"Saya minta PPK dan PPTK

untuk bekerjasama dengan auditor BPK saat pemeriksaan terinci ini. Teman-teman yang bertanggungjawab atas kegiatan tahun lalu agar diminta membantu tim BPK RI," ucap Bupati.

Sementara itu, Sekretaris

Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah mengatakan, pemeriksaan terinci merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun.

"Pemeriksaan terinci merupakan pemeriksaan reguler. Saya minta OPD yang

ada mohon untuk segera menindaklanjuti permintaan Tim BPK RI Kalbar," pinta Yosepha.

Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Faujar Sukma Wibawa mengatakan, pemeriksaan terinci ini sudah dilakukan setiap tahun oleh BPK. Tujuan pemeriksaan terinci untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan Pemkab Sintang Tahun Anggaran 2021 sudah disajikan secara wajar dalam hal material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.

"Laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Saat pemeriksaan interim kemarin ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemkab Sintang," pungkasnya. (var)